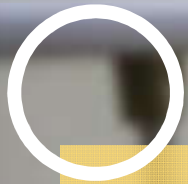




KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Mingguan PEN 2021

TIM MONEV PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEN 2021

20 Februari 2021



PEN 2021 difokuskan untuk kesehatan, perlinsos dan penciptaan lapangan kerja Rp699,43 T* (real sementara 2020 Rp579,78 T)

KESEHATAN

Rp176,30 T

2020 : Rp63,51 T

Diagnostik untuk Testing dan Tracing	9.91
Therapeutic untuk biaya perawatan, isoman, insentif nakes, dan obat	61.94
Vaksinasi menuju herd immunity	58.18
Penelitian Lab Vaksin Covid-19	0.67
Gugus Tugas (RSD Wisma Atlet)	0.53
Komunikasi untuk kampanye 3M dan Vaksin	1.18
Bantuan luran JKN	2.43
Belanja Penanganan Covid-19 untuk sarpras, alkes, dan labkes	1.30
Insentif perpajakan Kesehatan termasuk PPN dan BM Vaksin	18.61
Cadangan Imunisasi Reguler	3.71
Penanganan kesehatan lainnya untuk penguatan penanganan di daerah	14.86
*Angka dapat berubah dengan menyesuaikan update kebijakannya.	
Tambahan Program Preventif	3.00

PERLINSOS

Rp157,41 T

2020 : Rp220,39 T

PKH untuk 10 Jt KPM	28.71
Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM @Rp200rb/bln	45.12
Bansos Tunai untuk 10 juta KPM @Rp300rb/bln	12.00
Kartu Pra Kerja	20.00
Diskon Listrik untuk 31,4 jt rumah tangga	5.64
BLT Dana Desa untuk 8 juta KPM @Rp300rb/bln	14.40
Subsidi Kuota Internet 20 GB (PAUD), 35 GB (SD-SMA), 50 GB (mahasiswa)	7.79
luran JKP (Ciptaker)	1.55
Cadangan Bansos Tunai antisipasi perpanjangan	22.20

PROGRAM PRIORITAS

Rp125,06 T

Sektoral K/L dan Pemda 2020 : Rp66,59 T

Program Padat Karya K/L untuk penciptaan tenaga kerja	27.33
Pariwisata a.l. untuk KSPN, Ecowisata, serta pelatihan SDM	8.66
Ketahanan Pangan a.l. untuk program food estate dan irigasi	47.10
ICT a.l. untuk penyediaan BTS serta pemutakhiran DTKS	16.65
Kawasan Industri untuk pengembangan Kawasan strategis	11.22
Fasilitas Pinjaman Daerah	10.00
Program Prioritas lainnya a.l. untuk TKDN dan Subsidi Bunga Pinjaman daerah	4.11



PEN 2021 difokuskan untuk kesehatan, perlintas dan penciptaan lapangan kerja Rp699,43 T* (real sementara 2020 Rp579,78 T)



DUKUNGAN UMKM DAN KORPORASI

Rp186,81 T

2020 : Rp173,17 T

Subsidi bunga UMKM KUR dan Non-KUR dengan target 17,8 Jt UMKM	31.95
Bantuan Produktif untuk 14,45 Jt usaha @Rp1,2 juta	17.34
IJP UMKM dan Korporasi	8.51
- IJP UMKM untuk target kredit yang dijamin Rp62 T	4.76
- IJP Korporasi untuk target kredit yang dijamin Rp66 T	3.75
Penjaminan Loss Limit UMKM dan Korporasi	2.00
Pembebasan Rekmin, Biaya Beban, dan Abonemen untuk perpanjangan selama 3 bulan (Jan-Mar)	1.27
PMN untuk 6 BUMN, LPEI, dan SWF/LPI	58.79
Penempatan Dana untuk restrukturisasi kredit perbankan	66.99

INSENTIF USAHA

Rp53,86 T

2020 : Rp56,12 T

PPh 21 DTP	5.78
PPh Final UMKM DTP	0.84
PPnBM DTP Kendaraan Bermotor	2.99
BM DTP	0.49
Pembebasan PPh 22 Impor	13.08
Pengurangan Angsuran PPh 25	19.71
Pengembalian Pendahuluan PPN	4.43
Penurunan Tarif PPh Badan	6.53
PPN tidak dipungut KITE (PMK 31/2020)	0.004

*Angka dapat berubah dengan menyesuaikan update kebijakannya.



Asumsi Kebutuhan Anggaran PEN Bidang Kesehatan 2021

Proyeksi penambahan kasus
positif : 1.710.000

Jumlah kasus positif per 31
Des 2020 : **742.198**

1,7 juta

KASUS POSITIF

Jumlah tes penemuan kasus :

- $1.710.000 \times 15 \text{ orang (kontak)}$
 $= 25.500.000$

25,5 juta

PENEMUAN KASUS

Jumlah pasien dirawat :

- $20\% \times 1.710.000 = 342.000$

342 ribu

PASIEN DIRAWAT

Jumlah pasien dirawat per 31
Des 2020 : **200.545** dengan
realisasi klaim Rp13,59 T

Jumlah pasien isolasi

- $80\% \times 1.710.000 = 1.368.312$
- **Isolasi Mandiri** = $20\% \times 1.368.312 = 273.662$ orang
- **Isoter Hotel/Wisma** = $80\% \times 1.368.312 = 1.094.650$

1,36 juta

PASIEN ISOLASI

80% kasus aktif
merupakan kasus
tanpa gejala/ringan

• Jumlah **dosis vaksin** :

- Vaksin Sinovac : 182.504.000 dosis
- Vaksin Novavax : 76.000.000 dosis
- Vaksin Astra Zeneca 82.800.000 dosis
- Vaksin Pfizer : 64.496.000 dosis
- Vaksin Covax : 18.000.000 (sesuai exercise Kemenkes)

Vaksin yang sudah diadakan di **2020**
sebanyak **3 juta dosis** dengan realisasi
Rp633,85 M

70% jumlah
penduduk
(Herd
Immunity)

• Tarif **insentif Nakes** :

- Januari – Juni dengan **tarif tetap**
- Juli – Desember dengan **tarif 50%**

Alokasi **Insentif Nakes Pusat** hingga **31 Des 2020** dapat terealisasi **100%** untuk
694.451 orang Nakes dan relawan
dengan realisasi Rp4,71 T





Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan difokuskan pada Program Vaksinasi dan penguatan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Rp Triliun	URAIAN	Total PEN 2021	Keterangan Manfaat Atau Output
KESEHATAN			
1.	Diagnostik	9.91	Asumsi dengan estimasi jumlah kasus 1,7 jt maka tracing dilakukan terhadap 15 orang yang kontak atau sekitar 25,5 Jt
	1. Testing	9.31	
	2. Tracing	0.60	
2.	Therapeutic	61.94	
	1. Klaim Pasien	32.33	Asumsi yang dirawat 20% dari kasus positif 1,7 Jt = 342 Rb
	2. Isoman supervisi Puskesmas	5.52	Asumsi Jumlah pasien isolasi 80% dari 1,7 Jt = 1.37 Jt
	3. Obat Covid	0.86	
	4. Insentif/Santunan Nakes	16.83	Besaran Insentif 100% Tahun 2020 selama 6 bulan, dan 50% insentif 2020 6 bulan berikutnya
	5. APD	6.40	
3.	Vaksinasi	58.18	Target Herd Immunity 70% atau 181,5 Jt penduduk
4.	Penelitian Lab	0.67	Untuk uji klinis Vaksin dan obat Covid-19
5.	Gugus Tugas (RSD Wisma Atlet)	0.53	2020 masuk pada belanja penanganan Covid-19
6.	Komunikasi	1.18	Kampanye public untuk 3M dan Vaksin pada Kominfo, TVRI, dan BNPB
7.	Bantuan Iuran JKN	2.43	
8.	Belanja Penanganan Covid-19	1.30	Kemenkes untuk sarpras, alkes, dan penguatan labkes serta pada BPOM untuk pengujian vaksin Covid-19
9.	Insentif perpajakan Kesehatan	18.61	termasuk Insentif Perpajakan Vaksin sebesar Rp15,26 T
10.	Cadangan Imunisasi Reguler	3.71	
11.	Penanganan kesehatan lainnya	14.86	Kebutuhan penanganan covid-19 melalui earmark TKDD (insentif kesehatan, isoman, vaksinasi, dan APD di daerah)
12.	Tambahan Program Preventif	3.00	Melalui realokasi anggaran Kemenkes
JUMLAH KESEHATAN		176.30	



Alokasi Perlindungan Sosial Untuk Pemulihan Dampak Covid-19

Rp Triliun	URAIAN	Real Smtr PEN 2020	Total PEN 2021	Keterangan Manfaat Atau Output
PERLINDUNGAN SOSIAL				
1.	PKH	36.71	28.71	Target 10 Jt KPM, indeks bantuan per tahun Hamil dan Anak Usia Dini Rp3 Jt, SD Rp900rb, SMP Rp1,5 Jt, SMA Rp 2 Jt, Disabilitas dan Lansia Rp2,4 Jt
2.	Bantuan Beras PKH	5.26	-	
3.	Sembako	41.84	45.12	Untuk 18,8 juta KPM @Rp200rb/bln/KPM
4.	Bantuan Tunai Non PKH	4.50	-	
5.	Bansos Jabodetabek	7.10	-	Diintegrasikan dengan bansos tunai di 2020
6.	Bansos Tunai	32.84	12.00	Untuk 10 juta KPM @Rp300rb/bln/KPM selama 4 bulan
7.	Pra Kerja	19.98	20.00	sama dengan alokasi 2020
8.	Diskon Listrik	11.45	5.64	untuk 31,4 jt rumah tangga, RT 450 VA, diskon 100% 3 bln, 50% 3 bln berikutnya serta RT 900 VA, diskon 50% 3 bln, 25 % 3 bln berikutnya
9.	BLT Dana Desa	22.78	14.40	Untuk 8 juta KPM dengan bantuan @Rp300rb/bln/KPM utk 6 bulan (Jan-Juni)
10.	Bantuan Subsidi Gaji (Kemenaker)	29.81		
Catatan: 1. Tambahan Kartu Prakerja bersumber dari realokasi cadangan pendidikan 2. Subsidi Kuota internet 2021 dari realokasi Kemendikbud/Kemenag				
11.	Bantuan Upah Guru Honorar	4.08		



Program Prioritas: Penciptaan Tenaga Kerja (Padat Karya), Food Estate, Pariwisata, ICT, dan Kawasan industri



URAIAN Rp Triliun		Total PEN 2021	Keterangan Manfaat Atau Output
PROGRAM PRIORITAS			
1.	Program Padat Karya K/L	27.33	Program Penciptaan Tenaga Kerja melalui Kemen PUPR (a.l. Sanitasi, Drainase, Jembatan), Kemenhub, Kementan, KKP, Kemen ESDM, KLHK/BRG/KKP (Penanaman Mangrove).
2.	Pariwisata	8.66	melalui DAK dan K/L (a.l. KemenPUPR, Kemenparekraf, KLHK) untuk mendukung pengembangan pariwisata (a.l. KSPN, Ecowisata, pelatihan SDM pariwisata)
3.	Ketahanan Pangan	47.10	melalui Kementan, Kemen PUPR, KKP, dan Kemenhan (BCLS) untuk program a.l. food estate dan pembangunan bendungan dan irigasi
4.	ICT	16.65	a.l. untuk untuk penyediaan BTS serta pemutakhiran DTKS
5.	Kawasan Industri	11.22	a.l. untuk Kawasan industri teluk Bintuni, batang, dan subang (KemenPUPR) serta BP Batam untuk pengembangan Kawasan strategis
6.	Fasilitas Pinjaman Daerah	10.00	Melanjutkan program 2020, pengajuan utk 2021 sudah ada sejak akhir 2020
7.	Program Lainnya	0.19	Untuk program Kemenperin (TKDN) serta subsidi bunga pinjaman daerah
8.	Cadangan Belanja PEN	3.92	sebagian besar telah dimanfaatkan untuk berbagai usulan tambahan
Jumlah Sektor K/L/PEMDA		125.06	



Dukungan untuk UMKM dan Korporasi 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

URAIAN Rp Triliun		Real Smtr PEN 2020	Total PEN 2021	Keterangan Manfaat Atau Output
DUKUNGAN UMKM DAN KORPORASI				
1.	Subsidi bunga UMKM KUR dan Non KUR	12.83	31.95	Target penyaluran KUR menjadi Rp253 T. Target debitur KUR dan Non KUR 17,8 Jt UMKM
2.	Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM)	28.80	17.34	14,45 juta penerima dengan manfaat Rp1,2 juta. Sebanyak 9,8 Jt merupakan penerima 2020
3.	PPh Final UMKM DTP	0.67	-	Masuk pada kluster insentif usaha pada 2021
4.	IJP UMKM dan Korporasi	1.10	8.51	
	- IJP UMKM	1.09	4.76	Target kredit yang dijamin Rp62 T
	- IJP Korporasi	0.01	3.75	Target kredit yang dijamin Rp66 T
5.	Penjaminan Loss Limit UMKM dan Korporasi	2.00	2.00	
6.	Pembebasan Rekmin, Biaya Beban, dan Abonemen	-	1.27	Perpanjangan selama 3 bulan (Jan-Mar).
7.	Pembiayaan Investasi LPDB KUMKM	1.29	-	
8.	PMN untuk BUMN dan LPEI	24.07	43.76	HK Rp25,61 T, ITDC Rp0,47 T; Pelindo Rp1,2 T; KIW Rp0,977 T & LPEI Rp5 T, Waskita Rp7,9 T dan PT KAI Rp2,6 T



Insentif Usaha Tahun 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Rp Triliun		URAIAN	Real Smtr PEN 2020	Total PEN 2021	Manfaat Atau Output *)
INSENTIF USAHA					
1.	PPh 21 DTP		2.51	5.78	Target pemanfaat 131 ribu WP
2.	PPh Final UMKM DTP		-	0.84	Target pemanfaat 248 ribu WP
3.	PPnBM DTP Kendaraan Bermotor		-	2.99	Mendorong konsumsi masyarakat menengah dan pemulihan sektor industri otomotif. Asumsi: penambahan penjualan mobil sebesar 80 ribuan unit.
4.	BM DTP		0.07	0.49	Mendukung ketersediaan bahan baku untuk sektor industri tertentu yang terdampak Covid-19
5.	Pembebasan PPh 22 Impor		13.56	13.08	Target pemanfaat 14 ribu WP
6.	Pengurangan Angsuran PPh 25		20.56	19.71	Target pemanfaat 66 ribu WP
7.	Pengembalian Pendahuluan PPN		5.05	4.43	Target pemanfaat 2.500 WP
8.	Penurunan Tarif PPh Badan		12.68	6.53	Dapat langsung dimanfaatkan oleh seluruh WP Badan
9.	Pembebasan Rekmin, Biaya Beban, dan Abonemen		1.69	-	Masuk ke dalam kluster dukungan UMKM dan korporasi
10.	PPN tidak dipungut KITE (PMK 31/2020)			0.004	Menambah <i>cashflow</i> perusahaan KITE
JUMLAH INSENTIF USAHA			56.12	53.86	*) Berdasarkan realisasi pemanfaatan insentif tahun 2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



TERIMA KASIH



LAMPIRAN



Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan difokuskan pada Program Vaksinasi dan penguatan 3T



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1. Program Vaksinasi

- Perkiraan Rp58,18 T untuk seluruh kebutuhan dosis 2021
- Sumber Dana: antara lain Cadangan Vaksin Rp18 T

2. Insentif nakes dan santunan kematian

- Besaran 100% Tahun 2020 selama 6 bulan, dan 50% insentif 2020 6 bulan berikutnya
- Kebutuhan insentif nakes pusat 2021 Rp5,2 T dan kurang bayar 2020 Rp2 T
- Insentif nakes daerah Rp9,58 T (termasuk kurang bayar 2020 Rp1,4 T) akan memanfaatkan earmark TKDD

3. Biaya perawatan pasien: Diusulkan 12 bulan (perk 342 rb pasien) Rp24,0 T dan kurang bayar 2020 Rp8,3 T

4. Belanja Penanganan dalam APBN pada Kemenkes untuk sarpras, alkes, dan penguatan labkes serta pada BPOM untuk pengujian vaksin Covid-19 (termasuk realokasi anggaran Kemenkes untuk keg preventif Rp3 T)

5. Insentif Pajak Kesehatan 2021 termasuk Insentif Perpajakan Vaksin sebesar Rp15,26 T

6. Earmark TKDD Rp39,8 T (DAU/DBH Rp30 T; DID Rp4,05 T; Dana Desa 5,75 T) dimanfaatkan sebagian untuk kebutuhan penanganan covid (insentif kesehatan, isoman, vaksinasi, dan APD di daerah)

Rp Triliun	URAIAN	Real Smtr PEN 2020	2021			
			APBN	Earmark TKDD/Re alokasi	Usulan Tambahan	Total
KESEHATAN						
1.	Diagnostik		-	0,60	9,31	9,91
	1. Testing		-	-	9,31	9,31
	2. Tracing		-	0,60	-	0,60
2.	Therapeutic	8,88	-	20,20	41,74	61,94
	1. Klaim Pasien			-	32,33	32,33
	2. Isoman supervisi Puskesmas			5,52	-	5,52
	3. Obat Covid			-	0,86	0,86
	4. Insentif/Santunan Nakes	8,88		9,58	7,25	16,83
	5. APD	-	-	5,10	1,30	6,40
3.	Vaksinasi		18,00	4,15	36,03	58,18
	1. Pengadaan Vaksin		18,00		32,24	50,24
	2. Sistem Informasi			-	0,61	0,61
	3. Sar Distribusi			-	3,15	3,15
	4. Pelaksanaan Vaksinasi		-	4,15	0,03	4,17
4.	Penelitian Lab		-	-	0,67	0,67
5.	Gugus Tugas (RSD Wisma Atlet)	10,03			0,53	0,53
6.	Komunikasi	-	-	-	1,18	1,18
	1. Kominfo				0,55	0,55
	2. TVRI				0,05	0,05
	3. BNPB				0,58	0,58
7.	Bantuan Iuran JKN	4,11	2,43		-	2,43
8.	Belanja Penanganan Covid-19	36,43	1,30	3,00	-	4,30
	a.l. - Kemenkes	22,73	1,17	3,00	-	4,17
	- BPOM		0,13		-	0,13
9.	Insentif perpajakan Kesehatan	4,05	-		18,61	18,61
	- PPN (DTP dan SF)	1,20			11,99	11,99
	- BM	2,85			6,62	6,62
10.	Cadangan Imunisasi Reguler	-	3,71		-	3,71
11.	Earmark TKDD untuk Kesehatan	-	-	14,86	-	14,86
JUMLAH KESEHATAN		63,51	25,43	42,80	108,07	176,30



Alokasi Perlindungan Sosial Untuk Pemulihan Dampak Covid-19



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1. **PKH:** Target 10 Jt KPM, indeks bantuan per tahun Hamil dan Anak Usia Dini Rp3 Jt, SD Rp900rb, SMP Rp1,5 Jt, SMA Rp 2 Jt, Disabilitas dan Lansia Rp2,4 Jt
2. **Kartu sembako:** 18,8 juta KPM @Rp200rb/bln/KPM
3. **Bantuan Sosial Tunai:** 10 juta KPM
 - a. Sudah dialokasikan Rp12 T → @Rp300rb/bln/KPM selama 4 bulan
 - b. **Cadangan BST Rp15 T** : jika diperpanjang 5 bulan
4. **BLT Dana Desa:**
 - a. 8 juta KPM dengan bantuan:@Rp300rb/bln/KPM utk 6 bulan (Jan-Juni) → Rp14,4 T
 - b. Cadangan perpanjangan 3 bulan Rp7,2 T
5. **Pra Kerja: Pagu sama dengan 2020**
6. **Diskon listrik** 31,4 jt rumah tangga
 - a. RT 450 VA, diskon 100% 3 bln, 50% 3 bln berikutnya
 - b. RT 900 VA, diskon 50% 3 bln, 25 % 3 bln berikutnya.
7. **Subsidi Kuota**
 - a. Kemenag 11,1 jt dan Kemendikbud 29,8 jt
 - b. 20 GB (PAUD), 35 GB (SD-SMA), 50 GB (mahasiswa)
8. **Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan** → Sesuai amanat UU Ciptaker

Rp Triliun	URAIAN	Real Smtr PEN 2020	2021			
			APBN	Earmark TKDD/Re alokasi	Usulan Tambahan	Total
PERLINDUNGAN SOSIAL						
1.	PKH	36,71	28,71		-	28,71
2.	Bantuan Beras PKH	5,26	-		-	-
3.	Sembako	41,84	45,12		-	45,12
4.	Bantuan Tunai Non PKH	4,50	-		-	-
5.	Bansos Jabodetabek	7,10	-		-	-
6.	Bansos Tunai	32,84	12,00		-	12,00
7.	Pra Kerja	19,98	10,00	10,00	-	20,00
8.	Diskon Listrik	11,45	-		5,64	5,64
9.	BLT Dana Desa	22,78	14,40		-	14,40
10.	Bantuan Subsidi Gaji (Kemenaker)	29,81	-		-	-
11.	Bantuan Upah Guru Honorer	4,08	-		-	-
12.	Subsidi Kuota Internet	4,05	-	7,79	-	7,79
13.	Iuran JKP (Ciptaker)				1,55	1,55
14.	Cadangan Bansos Tunai	-	-	7,20	15,00	22,20
JUMLAH PERLINDUNGAN SOSIAL		220,39	110,23	24,99	22,19	157,41

Catatan:

1. Tambahan Kartu Prakerja bersumber dari realokasi cadangan pendidikan
2. Subsidi Kuota internet 2021 dari realokasi Kemendikbud/Kemenag
3. Cadangan Bansos Tunai pada kolom earmark merupakan antisipasi BLT Dana Desa jika diperpanjang selama 3 bulan



Program Prioritas: Penciptaan Tenaga Kerja (Padat Karya), Food Estate, Pariwisata, ICT, dan Kawasan industri



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Program Penciptaan Tenaga Kerja (Padat Karya K/L)** melalui Kemen PUPR, Kemenhub, Kementan, KKP, Kemen ESDM, KLHK/BRG/KKP (Penanaman Mangrove)
- Pariwisata** melalui DAK dan K/L (a.l. KemenPUPR, Kemenparekraf, KLHK) untuk mendukung pengembangan pariwisata
- Food Estate** (Ketahanan Pangan) utamanya melalui Kementan, Kemen PUPR, KKP, dan Kemenhan (BCLS)
- Kawasan industri** antara lain untuk Kawasan industri teluk Bintuni, batang, dan subang (KemenPUPR) serta BP Batam untuk pengembangan Kawasan strategis
- ICT** antara lain untuk penyediaan BTS serta pemutakhiran DTKS
- Fasilitas pinjaman daerah (Pembiayaan) → 2021** dialokasikan Rp10 T
- Cadangan PEN 2021** sebagian besar telah dimanfaatkan untuk berbagai usulan tambahan
- Alokasi PEN Tahun 2021 merupakan komponen yang tidak difokuskan/realokasi**

Rp Triliun	URAIAN	Real Smtr PEN 2020	2021			
			APBN	Earmark TKDD/Re alokasi	Usulan Tambahan	Total
PROGRAM PRIORITAS						
1.	Program Padat Karya K/L	21,02	19,81	-	7,52	27,33
	- Kemen PUPR	12,34	13,13		2,50	15,63
	- Kemenhub	7,33	3,52		2,06	5,59
2.	Pariwisata	2,82	8,66			8,66
	a.l. - Hibah Pemda	2,26	-		-	-
	- Transfer ke Daerah		4,22		-	4,22
	- K/L	0,55	4,44		-	4,44
3.	Food Estate dan Lingkungan Hidup	5,98	40,13	-	6,96	47,10
	- K/L	2,86	40,13	-	6,96	47,10
	a.l. Kementan	1,54	3,28		4,46	7,74
	Kemenhan (BCLS)				2,50	2,50
	- Subsidi Pupuk	3,12			-	-
4.	ICT	-	16,65			16,65
	a.l. Kemenkominfo		12,95		-	12,95
5.	Kawasan Industri	-	11,22			11,22
	a.l. Kemen PUPR	-	9,83		-	9,83
6.	Bantuan Pesantren	2,61	-		-	-
7.	Insentif Perumahan	0,56	-		-	-
8.	DID Pemulihan Ekonomi	5,00	-		-	-
9.	Cadangan DAK Fisik	7,29	-		-	-
10.	Fasilitas Pinjaman Daerah	18,76	10,00		-	10,00
12.	Cadangan PEN		75,76	-	71,84	3,92
13.	Lainnya	2,56	0,08	-	0,11	0,19
	- Kemenperin TKDN)	0,01			0,11	0,11
	- Subsidi Bunga Pinjaman Daerah		0,08	-	-	0,08
JUMLAH SEKTORAL KL/PEMDA		66,59	182,30	-	- 57,24	125,06

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Dukungan untuk UMKM dan Korporasi 2020-2021



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1. Subsidi Bunga

- KUR Reguler naik Rp7,6 T menyesuaikan target penyaluran kredit dari Rp202 T menjadi Rp253 T.
- Perpanjangan Insentif Subsidi Bunga KUR 3% selama 6 bln Rp3,45 T.
- Terdapat kurang bayar subsidi bunga 2020 Rp1,45 T

2. BPUM : 14,45 juta penerima dengan manfaat Rp1,2 juta

3. IJP → Sudah SPP Rp5,15 T untuk semester 1

- IJP koperasi Rp3,75 T untuk target kredit yang dijamin Rp66 T
- IJP UMKM Rp4,76 T untuk target kredit yang dijamin Rp62 T

4. Perpanjangan Pembebasan Rekmin, biaya beban dan Abonemen tahun 2021 selama 3 bulan (Jan-Mar).

5. PMN

- HK Rp6,2 T; ITDC Rp0,47 T; Pelindo Rp1,2 T; KIW Rp0,977 T & LPEI Rp5 T
- Usulan Tambahan: HK Rp19,4 T; PT Waskita Rp7,9 T dan PT KAI Rp2,6 T

6. SWF diusulkan Rp15 T

7. Pembiayaan PEN lainnya untuk tambahan PMN LPI dan BUMN yang melaksanakan penugasan prioritas

8. Penempatan Dana Rp66,99 T termasuk sisa dana di SAL Rp37,5 T → dilakukan evaluasi setiap 3 bulan dan disesuaikan penggunaannya

9. PPh Final UMKM DTP dimasukan dalam kluster insentif pajak

Rp Triliun	URAIAN	Real Smtr PEN 2020	2021			
			APBN	Earmark TKDD/Re alokasi	Usulan Tambahan	Total
DUKUNGAN UMKM DAN KORPORASI						
1.	Subsidi bunga UMKM	12,83	14,84		17,11	31,95
-	KUR		14,84		11,10	25,94
-	Non KUR		-		4,56	4,56
-	Kurang Bayar 2020		-		1,45	1,45
2.	Bantuan Produktif	28,80	-		17,34	17,34
3.	PPh Final UMKM DTP	0,67	-		-	-
4.	IJP UMKM dan Korporasi	1,10	-		8,51	8,51
-	IJP UMKM	1,09	-		4,76	4,76
-	IJP Korporasi	0,01	-		3,75	3,75
5.	Penjaminan Loss Limit UMKM/ Korporasi	3,00	2,00	-	-	2,00
6.	Pembebasan Rekmin, Biaya Beban, dan Abonemen	-			1,27	1,27
7.	Pembiayaan Investasi LPDB KUMKM	1,29	-			-
8.	PMN	24,07	13,86	-	29,90	43,76
-	HK		6,21		19,40	25,61
-	ITDC		0,47			0,47
-	Pelindo		1,20			1,20
-	KIW		0,98			0,98
-	LPEI		5,00			5,00
-	PT Waskita				7,90	7,90
-	PT KAI				2,60	2,60
9.	Pemberian pinjaman (Investasi) kepada BUMN	19,65				-
10.	SWF	15,00			15,00	15,00
11.	Pembiayaan PEN Lainnya		33,00	- 33,00		-
12.	Penempatan Dana dan Cadangan	66,75			-	66,99
JUMLAH DUKUNGAN UMKM DAN KORPORASI		173,17	63,70	- 33,00	89,13	186,81



Insentif Usaha Tahun 2021

Kluster Insentif Usaha Rp53,86 T

- ✓ PPh 21 DTP
- ✓ PPh Final DTP UMKM
- ✓ PPnBM DTP Kendaraan Bermotor
- ✓ Insentif Bea Masuk
- ✓ Pembebasan PPh 22 Impor
- ✓ Pengembalian Pendahuluan PPN
- ✓ Pengurangan angsuran PPh pasal 25
- ✓ Penurunan tarif PPh Badan
- ✓ PPN tidak dipungut KB/KITE

URAIAN	Real Smtr PEN 2020	2021			
		APBN	Earmark TKDD/Re alokasi	Usulan Tambahan	Total
Rp Triliun					
INSENTIF USAHA					
1. PPh 21 DTP	2,51	2,96		2,82	5,78
2. PPh Final UMKM DTP	-	0,14		0,70	0,84
3. PPnBM DTP Kendaraan Bermotor				2,99	2,99
4. BM DTP	0,07	-		0,49	0,49
5. Pembebasan PPh 22 Impor	13,56	12,00		1,08	13,08
6. Pengurangan Angsuran PPh 25	20,56	-		19,71	19,71
7. Pengembalian Pendahuluan PPN	5,05	5,30		- 0,87	4,43
8. Penurunan Tarif PPh Badan	12,68	-		6,53	6,53
9. Pembebasan Rekmin, Biaya Beban, dan Abonemen	1,69	-		-	-
10. PPN tidak dipungut KB/KT (PMK 31/2020)				0,00	0,00
JUMLAH INSENTIF USAHA	56,12	20,40	-	33,46	53,86



Identifikasi anggaran kesehatan dan anggaran penanganan covid bidang kesehatan tahun 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KOMPONEN	APBN		APBN Update	
	Anggaran Kesehatan	PEN Kesehatan	Anggaran Kesehatan	PEN Kesehatan
I. Anggaran Kesehatan	169,7	25,4	297,1	157,7
1. Belanja Pemerintah Pusat	130,7	25,4	220,1	117,9
A. K/L	95,1	1,3	95,1	4,3
1. Kemenkes	84,3	1,2	84,3	4,2
2. BPOM	2,1	0,1	2,1	0,1
3. BKKBN	3,5	-	3,5	-
4. K/L Lainnya	5,2	-	5,2	-
i. Kemenhan	2,9	-	2,9	-
ii. Polri	2,3	-	2,3	-
B. Non K/L	35,6	24,1	35,6	24,1
1. Jamkes ASN/Pejabat	11,5	-	11,5	-
2. Cad Bantuan Iuran PBP/PU/BP	2,4	2,4	2,4	2,4
3. Cadangan Anggaran Kesehatan	21,7	21,7	21,7	21,7
C. Usulan Tambahan Belanja Pusat	-	-	89,5	89,5
a.l. 1. Testing Tracing	-	-	9,3	9,3
2. Biaya Perawatan	-	-	32,3	32,3
3. Insentif Nakes	-	-	7,2	7,2
6. Program Vaksinasi	-	-	36,0	36,0
9. Komunikasi	-	-	1,2	1,2

KOMPONEN	APBN		APBN Update	
	Anggaran Kesehatan	PEN Kesehatan	Anggaran Kesehatan	PEN Kesehatan
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	39,1	-	76,9	39,8
A. DAK Fisik: Bidang Kesehatan	20,8	-	19,8	-
B. DAK Nonfisik: BOK dan BOKB	12,7	-	12,7	-
C. Dana Otsus	3,0	-	2,9	-
D. Dana Insentif Daerah	0,7	-	0,7	-
E. DBH (Tambahan Migas dan CHT)	1,9	-	1,0	-
F. Earmark DAU/DBH untuk Kesehatan	-	-	30,0	30,0
G. Earmark Dana Desa untuk Pen Covid	-	-	5,8	5,8
H. Earmark DID untuk Kesehatan	-	-	4,1	4,1
II. Non Anggaran Kesehatan	-	-	-	18,6
A. Insentif Perpajakan Vaksin	-	-	-	9,8
1. IPPN DTP	-	-	-	1,2
2. PPN (SF)	-	-	-	6,0
3. BM (SF)	-	-	-	2,6
B. Insentif Perpajakan Non Vaksin	-	-	-	8,8
1. PPN DTP	-	-	-	4,8
2. BM SF	-	-	-	4,0
JUMLAH	169,7	25,4	297,1	176,3

1. Insentif perpajakan dalam bentuk DTP Rp5,99 T dan pembebasan pajak Rp12,62 T
2. Komposisi insentif perpajakan vaksin dan non vaksin bersifat sementara



Rincian Kegiatan Padat Karya K/L

URAIAN	Pagu	Tambahan	Pemanfaatan
1. Program Padat Karya K/L	19,81	7,52	
a. Kemen PUPR	13,13	2,50	Pagu: Pamsimas (penyediaan air minum berbasis masy), sanimas (sanitasi berbasis masy) TPS3R1), PISEW2), KOTAKU3) Revitalisasi drainase, pemeliharaan jalan/ jembatan P3TGA14), operasi/pemeliharaan (OP) irigasi/ rawa, food estate, OP air tanah/air baku, dan Rumah Swadaya Tambahan: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk 105,6 ribu unit
b. Kemenhub	3,52	2,06	Pagu: Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api/ Pelabuhan/ Transportasi Jalan dan Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara serta Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Kantor Tambahan: Pembangunan/rehabilitasi fasilitas kenavigasian, lanjutan pekerjaan pembangunan bandara dan perpanjangan runaway, bangun/rehab rel dan fasilitas perkeretaapian, dan bangun pelabuhan, terminal

URAIAN	Pagu	Tambahan	Pemanfaatan
c. Kementan	1,29	1,16	Pagu: Penguatan perlindungan Tanaman Pangan dan gangguan OPT/DPI5), pengelolaan air irigasi untuk pertanian, serta perluasan dan perlindungan lahan pertanian Tambahan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tertier, Jalan pertanian (jalan usaha tani, jalan produksi), optimasi lahan, dan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
d. KKP	0,41	-	Irigasi Perikanan Tambak/Kolam (Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif/PITAP); Minapadi (budidaya ikan dan menanam padi); Bantuan Keramba Jaring Apung (KJA) Budaya Laut; Kluster kawasan tambak udang; Rehabilitasi kawasan mangrove; serta Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
e. ESDM	1,46	-	Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS)
f. KLHK, KKP, BRG	-	1,80	penanaman mangrove: 83 ribu ha



Rincian Kegiatan Pariwisata dan Pangan K/L



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

URAIAN	Pagu	Pemanfaatan
2. Pariwisata	4,44	
- Kemenparekraf	0,17	a.l pelatihan SDM Pariwisata dan Unggulan, pelatihan bagi Pelaku parekraf di destinasi prioritas, Pengembangan Infrastruktur dasar
- KLHK	0,27	a.l Pembangunan Persemaian Modern (ecowisata) di Destinasi Prioritas Wisata
- Kemen PUPR	3,81	a.l penataan kawasan wisata, penataan KSPN
- Kemendes	0,05	a.l Digitalisasi Destinasi Wisata Daerah Tertinggal, dan Bantuan Sarana Prasarana Pendukung Pengembangan Objek Wisata
- Kemendag	0,08	a.l peningkatan kewirausahaan dan bantuan pemasaran pusat Jajanan Kuliner pada 10 kawasan wisata
- Kemenko Maritim	0,05	koordinasi implementasi kebijakan bidang pariwisata
- Kemen ATR/BPN	0,01	sertifikasi lahan di daerah wisata

URAIAN	Pagu	Tambahan	Pemanfaatan
3. Pangan	40,13	6,96	
a. KKP	1,12	-	Kapal perikanan, bantuan alat penangkap ikan, premi asuransi nelayan, umodernisasi armada, bangun/ rehab pelabuhan perikanan, pasar ikan, sentra kuiner
b. Kementan	3,28	4,46	Pagu: Food estate Kalteng, Pekarangan Pangan Lestari, Peningkatan Produktivitas Tambahan: Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Padi, Jagung Kedelai ; Peningkatan Komoditas Hortikultura, Perkebunan, peternakan ; Sarpras, Litbang dan Penyuluhan
c. KLHK	0,10	-	identifikasi Kawasan hutan menjadi lahan pertanian di Kalteng
d. Kem ATR	1,19	-	untuk SHAT PTSL, Mandiri, Redistribusi Tanah, Konsolidasi Tanah dan BMN
e. Kem PUPR	34,30	-	Food estate, ketahanan pangan nasional (bendungan dan irigasi)
f. Kemendes	0,15	-	Food estate di di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau Kalteng berupa Pembangunan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana Kawasan transmigrasi, Perpindahan dan penempatan penduduk transmigran, Pengembangan usaha dan social budaya.
g. Kemenhan (BCLS)	-	2,50	penanaman singkong dan produksi tepung tapioka



Rincian Kegiatan Kawasan Industri dan ICT K/L

URAIAN	Pagu	Pemanfaatan
4. Kawasan Industri	11,22	
a. Kemen PUPR	9,83	Dukungan penyediaan air baku, pengamanan pantai, jalan Kawasan/jalan akses, fasilitas permukiman Kawasan Industri Batang dan Subang
b. BP Batam	1,20	Program Pengembangan Kawasan Strategis
c. Kemenhub	0,01	FS dan DED kawasan industri
d. Kemenperin	0,02	FS dan DED untuk mengundang investor
e. BKPM	0,12	menyusun peta investasi
f. BP Sabang	0,05	FD dan DED untuk menarik investor

URAIAN	Pagu	Pemanfaatan
5. ICT	16,65	
a. Kemenkominfo	12,95	a.l penyediaan BTS di daerah 3T, literasi Digital, transformasi digital sektor strategis, digital technopreneur
b. Kemenkeu	2,11	a.l peningkatan kualitas infrastruktur TIK untuk dukungan Implementasi digital workplace
c. LPP RRI	0,54	Pengadaan Peralatan Inti Transmisi dan Peralatan pendukung siaran Gedung Existing SLN
d. LPP TVRI	0,25	Sistem Infrastruktur Penyiaran Digital
e. Kemen PUPR	0,25	
f. BKPM	0,16	Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
g. Kemenaker	0,15	Percepatan implementasi Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online, pengawasan Ketenagakerjaan dengan aplikasi Siswasnaker
h. Kemensos	0,14	Pemutakhiran DTKS
i. Kemen ATR/BPN	0,11	Lisensi software pemetaan (Geo KKP dan lisensi office 365 sebanyak 600 unit)



PROGRAM PEN PADA PEMBIAYAAN TAHUN 2020-2021



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Uraian	2020		2021		
	KMK 525/2020	Realisasi	APBN	Usulan Tambahan	Total
A. Pembiayaan Investasi					
1. Investasi kepada BUMN	(19.070,0)	(19.070,0)	(8.855,0)	(29.900,0)	(38.755,0)
a. PT HK	(7.500,0)	(7.500,0)	(6.208,0)	(19.400,0)	(25.608,0)
b. PT BPUI	(6.000,0)	(6.000,0)	-	-	-
c. PT ITDC	(500,0)	(500,0)	(470,0)	-	(470,0)
d. PT PII	(1.570,0)	(1.570,0)	-	-	-
e. PT PNM	(1.500,0)	(1.500,0)	-	-	-
f. PT Pelindo III			(1.200,0)	-	(1.200,0)
g. PT KIW			(977,0)	-	(977,0)
h. PT Bio Farma	(2.000,0)	(2.000,0)	-	-	-
i. PT WSKT	-	-	-	(7.900,0)	(7.900,0)
j. PT KAI	-	-	-	(2.600,0)	(2.600,0)
2. Investasi kepada LPEI	(5.000,0)	(5.000,0)	(5.000,0)	-	(5.000,0)
3. Investasi Kepada BLU LPDB KUMKM	(1.292,0)	(1.292,0)	-	-	-
4. Lembaga Pengelola Investasi (SWF)	(15.000,0)	(15.000,0)	-	(15.000,0)	(15.000,0)
5. Investasi Pemerintah	(39.650,0)	(38.412,6)	(10.000,0)	-	(10.000,0)
a. PT GI	(8.500,0)	(8.500,0)	-	-	-
b. PT KAI	(3.500,0)	(3.500,0)	-	-	-
c. PT PN III	(4.000,0)	(4.000,0)	-	-	-
d. PT KS	(3.000,0)	(3.000,0)	-	-	-
e. Perumnas	(650,0)	(650,0)	-	-	-
f. Pinjaman PEN Daerah	(20.000,0)	(18.762,6)	(10.000,0)		(10.000,0)
6. Penempatan Dana unt Restrukturisasi	(66.988,0)	(66.750,0)	-		-
7. Cadangan Pembiayaan PEN	-	-	(33.000,0)	33.000,0	-
B. Kewajiban Penjaminan					
8. Penjaminan UMKM	(1.000,0)	(1.000,0)	(1.000,0)		(1.000,0)
9. Penjaminan korporasi	(2.000,0)	(2.000,0)	(1.000,0)		(1.000,0)
JUMLAH	(150.000,0)	(148.524,6)	(58.855,0)	(11.900,0)	(70.755,0)



OUTSTANDING PENEMPATAN DANA PEN PADA BULAN FEBRUARI 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Cluster	No	Bank	Penempatan Dana	Tanggal Penempatan	Tenor	Jatuh Tempo	
BANK HIMBARA	1	BTN	Rp10,0 T	4 Feb 2021	89 hari	4 Mei 2021	
	TOTAL		Rp10,0 T				
BANK SYARIAH	1	BSM	Rp1,0 T	30 Sep 2020	181 hari	30 Mar 2021	
	2	BRI Syariah	Rp1,0 T				
	3	BNI Syariah	Rp1,0 T				
	TOTAL		Rp3,0 T				
BPD	1	Bank BJB	Rp2,5 T	9 Feb 2021	178 hari	6 Agt 2021	
	2	Bank DKI	Rp2,0 T				
	3	Bank Jateng	Rp2,0 T				
	4	Bank Sulutgo	Rp1,0 T				
	5	Bank Jatim	Rp2,0 T				
	6	Bank BPD DIY	Rp1,0 T	10 Feb 2021	177 hari		
	7	Bank BPD Bali	Rp700 M				
	8	Bank Sulselbar	Rp1,0 T	2 Okt 2020	181 hari	1 Apr 2021	
	9	Bank Kalbar	Rp500 M				
	10	Bank Sumut	Rp1,0 T	9 Okt 2020			8 Apr 2021
	11	Bank Jambi	Rp300 M				
	12	Bank Aceh Syariah	Rp300 M	7 Des 2020	182 hari	7 Jun 2021	
	13	Bank Nagari	Rp250 M				
	14	Bank Bengkulu	Rp200 M				
	15	Bank Sumsel Babel	Rp 400 M				
	16	Bank Kalteng	Rp200 M				
	17	Bank Sulteng	Rp200 M				
	18	Bank Sultra	Rp200 M				
	19	Bank NTB Syariah	Rp200 M				
	20	Bank NTT	Rp100 M				
	21	Bank Maluku Malut	Rp200 M				
	22	Bank Kalsel	Rp200 M	5 Feb 2021	180 hari	5 Agt 2021	
	TOTAL		Rp16,45 T				
Total Penempatan Dana Pen			Rp29,45 T				

Perkembangan Penempatan Dana PEN

- Per tanggal 11 Februari 2021, Penempatan Dana PEN dilakukan kepada 1 Bank Himbara, 3 Bank Syariah dan 22 BPD.
- Tingkat rata-rata Suku Bunga penempatan adalah sebesar **2,84%**.
- Outstanding nilai penempatan mencapai **Rp29,45 triliun..**

Kinerja Penempatan Dana PEN

- Total penyaluran kredit telah mencapai **Rp340,87 triliun** untuk **4,97 juta debitur** (termasuk penempatan pada BUM yang telah kembali).
- Rata-rata *leverage* penempatan mencapai **5,11 kali**.
- Rata-rata NPL mencapai **2,49%**.
- Rata-rata suku bunga kredit mencapai **10,67%**.
- Rata-rata penurunan suku bunga kredit mencapai **2,24%**.

Kontribusi dalam Program PEN

- Penyaluran kredit untuk segmen UMKM telah mencapai **Rp228,35 triliun** (67% dari keseluruhan penempatan dana PEN).
- Penyaluran kredit untuk BPR telah mencapai **Rp1,64 triliun** (0,48% dari keseluruhan penempatan dana PEN).

Update

- Pada bulan Februari 2021, telah dilakukan penempatan dana pada Bank BTN dan 8 BPD (BJB, DKI, Jateng, Jatim, DIY, Sulutgo, Bali dan Kalsel).
- Penempatan dana PEN pada Bank Kalsel merupakan penempatan pertama, sedangkan Bank BTN dan 7 BPD lain adalah penempatan kembali.



Realisasi beberapa program PEN – s.d. 11 Februari 2021



Kluster Perlindungan Sosial Rp19,12 T

Dalam Rp T

Rincian Program	Pagu	Real	%	Output
PKH	28,71	6,83	23,79	9,67 Jt KPM
Kartu Sembako	45,12	6,43	14,26	15,82 Jt KPM
Bantuan Sosial Tunai	12	5,77	48,09	9,56 Jt KPM
BLT DD	14,4	0,09	0,63	280,4 Rb

Isu: Penyaluran BLT DD dari RKD ke KPM perlu dipecepat

Penyaluran dari RKUN ke RKD:

Penyaluran	Jumlah Desa	Jumlah KPM	Nilai Penyaluran (Rp M)
BLT Desa Bulan I	4.229	280.409	84,12
BLT Desa Bulan II	415	22.062	6,62

Kluster Program Prioritas Rp0,22 T

Rincian Program	Pagu	Real	%	Output
Padat Karya PUPR	12,93	0,22	1,7	14 Rb naker

Realisasi Penyaluran BLT dari RKD ke KPM (perekaman Pemda):



Penyaluran	Jumlah Desa	Jumlah KPM	Nilai Penyaluran (Rp M)
BLT Desa Bulan I	1.273	77.052	23,12
BLT Desa Bulan II	0	0	0



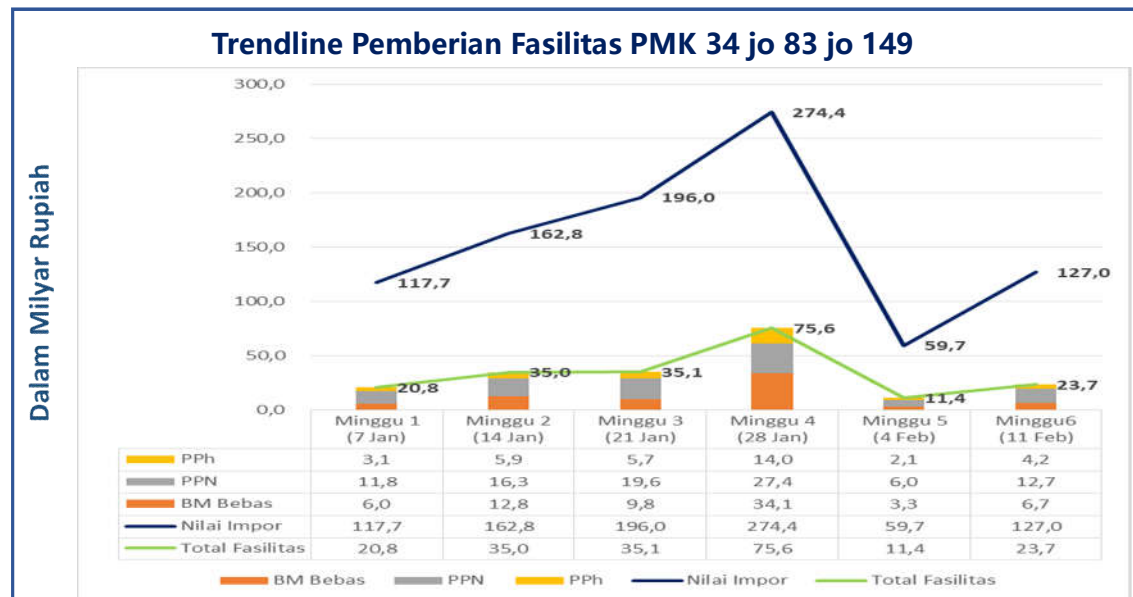
Dukungan Kepabeanaan dalam Penanganan Pandemi



Terdiri Atas Fasilitas



Sumber Data: Data Dit IKC s.d 15 Februari 2021



Nilai Impor pada minggu kelima (4 Feb) mengalami penurunan menjadi **Rp 59,7 Milyar**, dengan nilai insentif turun menjadi **Rp 11,4 Milyar** akibat turunnya volume impor obat-obatan, PCR dan Masker N95. Minggu kedua Feb kembali naik ke angka **Rp 127 Milyar** dengan fasilitas **23,7 Milyar**.

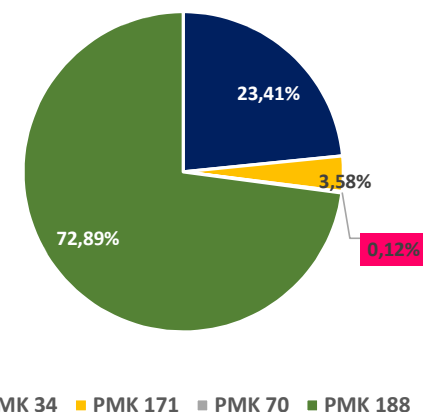
Pada tanggal 2 Februari 2021 dilakukan importasi sebanyak **11 Jt Dosis** Vaksin (total fasilitas **189 Milyar**) oleh PT Bio Farma menggunakan skema fasilitas PMK 188/PMK.04/2020 melalui mekanisme *rush handling*. Formalitas kepabeanaan telah dipenuhi dengan PIB nomor 034328 tanggal 3 Februari 2021



Realisasi Pemberian Fasilitas Pembebasan Alkes dan Vaksin

No	Skema	Nilai Impor (Rp)	Pembebasan BM (Rp)	Tidak Dipungut PPN (Rp)	Dikecualikan PPh 22 (Rp)	Total Fasilitas (Rp)
1	PMK 34 jo 83 jo 149/2020	950.668.139.760	73.439.398.662	95.071.614.255	35.389.206.616	203.900.219.534
2	PMK 171/2019	189.955.954.047	4.711.803.984	18.995.595.385	5.347.489.402	29.054.888.771
3	PMK 70/2012	7.084.189.000	389.514.450	708.418.900	212.409.725	1.310.343.075
4	PMK 188/2020	3.377.527.591.945	168.876.372.066	337.752.743.132	84.438.186.533	591.067.301.731
Total		4.525.235.874.752	247.417.089.162	452.528.371.672	125.387.292.276	825.332.753.111

Persentase Pemberian Fasilitas



➤ Realisasi fasilitas pembebasan BM dan PDRI untuk **Alkes** s.d 15 Februari 2021 sebesar **Rp 234,26 Miliar**

Dari **311 SKMK** fasilitas pembebasan :

- ✓ **PMK 34 jo 83 jo 149/2020** (fasilitas khusus Alkes untuk COVID-19) sebesar **Rp 203,90 Miliar**
- ✓ **PMK 171/2019** (fasilitas untuk Pemerintah Pusat, Pemda atau BLU) sebesar **Rp 29,05 Miliar**
- ✓ **PMK 70 /2012** (fasilitas untuk Yayasan/Lembaga non profit) sebesar **Rp 1,31 Miliar**

➤ Realisasi fasilitas pembebasan BM dan PDRI untuk **Vaksin** berdasarkan PMK 188/2020 (fasilitas untuk impor vaksin dan peralatan vaksinasi) s.d 15 Februari 2021 dari **3 SKMK** sebesar **Rp 591,06 Miliar**